

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	Iv
DAFTAR ISI	Vi
DAFTAR TABEL.....	Viii
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR LAMPIRAN.....	Xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.5. Metodologi	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1. Manajemen Strategis dan Kebijakan Pe- rusahaan	7
2.2. Analisis Lingkungan Usaha.....	10
2.3. Analisis Eksternal.....	11
2.4. Analisis Internal	14
2.5. Alternatif Strategi	16
2.6. Analisis SWOT	19
2.7. Analytic Hierarchy Process	21
BAB III GAMBARAN KEADAAN KABUPATEN KARAWANG.....	25
3.1. Gambaran Kabupaten Karawang	25
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapat- an.....	26
3.3. Susunan Organisasi.....	27
3.4. Sumber Daya Manusia	28
3.5. Perkembangan APBD Kabupaten Kara- wang	31

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan sumber kekayaan alam yang mempunyai nilai tidak terhingga karena diperlukan oleh makhluk hidup dan mutlak diperlukan sepanjang masa. Begitu pentingnya air, sehingga pengaturannya dituangkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi : *Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat*".

Pelaksanaan dari bunyi Undang-undang Dasar tersebut di atas penguasaan oleh negara dengan cara pengambilan dan penggunaan air harus memiliki izin terlebih dahulu, pengambilannya harus menggunakan alat ukur dan harus membayar pajak sebanyak air yang diambil.

Sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan di segala sektor, maka meningkat juga kebutuhan air, dimana air tidak lagi hanya mempunyai nilai sosial tetapi juga mempunyai nilai ekonomi.

Dengan keluarnya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 yang menggantikan Undang-undang nomor 12 tahun 1957, Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sangat penting artinya bagi pemenuhan APBD Kabupaten / Kota, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1957 pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota sebanyak 13 jenis dan retribusi daerah yang dipungut

olah Kabupaten / Kota sebanyak 17 jenis. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 banyaknya jenis pajak yang dipungut sebanyak 9 jenis dan retribusi sebanyak 3 jenis. Dengan demikian kehilangan jenis pajak dan retribusi yang dipungut oleh Kabupaten / Kota harus digantikan dengan pemungutan jenis pajak yang lebih intensif, sehingga pemenuhan APBD dapat dibantu dari sektor pajak dan retribusi yang baru.

Sebagai gambaran untuk tahun anggaran 1998/1999 APBD Kabupaten Karawang sebesar Rp. 144.363.817.195,01 dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 30.038.671.755,0 sebesar Rp. 3.463.136.665.00 dari pajak air bawah tanah dan air permukaan. Dari data di atas jelas bahwa pajak air bawah tanah dan air permukaan dapat memenuhi PAD sebesar 15,42 %. Dengan diberikannya pajak air bawah tanah dan air permukaan kepada Kabupaten / Kota, Kabupaten Karawang sangat terbantu untuk memenuhi APBD.

Penerimaan pajak air bawah tanah dan air permukaan yang pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 3.463.136.665.00 atau sebesar 15,42 % dari keseluruhan PAD, merupakan peringkat ke dua dari pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang setelah pajak penerangan jalan umum.

Begitu pentingnya pajak air bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan APBD dalam menggerakkan roda pemerintah Kabupaten Karawang, sehingga Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendapatan Daerahnya berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan

pajak dari sektor air bawah tanah dan air permukaan melalui berbagai Kebijakan strateginya.

Dari berbagai kondisi di atas penulis tertarik untuk meneliti *Kebijakan Strategis Kabupaten Karawang dalam Mengelola Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan*. Dalam penulisan ini akan dirumuskan alternatif kebijakan strategis terbaik dalam mengelola pajak air bawah tanah dan air permukaan di Kabupaten Karawang. Analisis ini didasarkan pada prinsip dasar kebijakan strategis yang akan dievaluasi berdasarkan data-data yang ada. Perangkat analisis yang digunakan adalah ETOP (Environmental Threat Opportunity Profile), SAP (Strategic Advantage Profile), SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity Threat) dan AHP (Analytic Hierarky Process).

1.2. Pokok Permasalahan

Dengan Diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 terjadi pengurangan jenis pajak dan retribusi yang dikelola oleh Kabupaten, sehingga pengelolaan pajak air bawah tanah dan air permukaan sangat perhu untuk dikelola secara optimum, dari 218 wajib pajak air bawah tanah dan air permukaan masih terdapat para wajib pajak yang belum tercatat disamping wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak air bawah tanah maupun air permukaan.

Walaupun penerimaan pajak air bawah tanah dan air permukaan di Kabupaten Karawang selahu melebihi dari target yang ditetapkan hal ini diakibatkan karena target lebih rendah dari pada

potensi yang ada, target pajak air bawah tanah tahun 1999/2000 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 sedangkan potensinya sebesar Rp. 5.279.689.021,00, dari air bawah tanah sebesar Rp. 1.882.614.915,00 dan dari air permukaan sebesar Rp. 3.344.374.107. Untuk potensi air permukaan setelah dikurang pengambilan PT. Pupuk Kujang sebesar 10 %, karena pengambilan air permukaan oleh PT. Pupuk Kujang melalui dua intake yaitu yang masuk ke Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, sehingga apabila pengambilan airnya dari Kabupaten Karawang maka pembayaran pajaknya melalui Kabupaten Karawang dan apabila pengambilan airnya dari Kabupaten Purwakarta maka pembayaran pajaknya melalui Kabupaten Purwakarta.

Dalam penarikan pajak air bawah tanah dan air permukaan terjadi keterlambatan pemberian surat ketetapan pajak daerah, hal ini disebabkan karena data penggunaan air bawah tanah dari Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Barat dan PT. Jasa Tirta II untuk air permukaan, setiap bulannya mengalami keterlambatan disamping pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang pembuat surat ketetapan pajak dan pandistribusiannya dinilai kurang apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajaknya, hal ini karena sistem komputer MAPATDA yang telah bejalan mengalami kerusakan. Kondisi ini, menyebabkan penetapan dan pembayaran pajak air bawah tanah dan air permukaan mengalami keterlambatan dua bulan dari waktu yang seharusnya diterima.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengelola pajak air bawah tanah dan air permukaan.
2. Untuk mengetahui alternatif kebijakan strategi terbaik Kabupaten Karawang dalam mengelola pajak air bawah tanah dan air permukaan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini dititik beratkan kepada sejauhmana kebijakan strategis Kabupaten Karawang dalam pengelola pajak air bawah tanah dan air permukaan.

1.5. Metodologi

Metode Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu study pustaka, pengumpulan data dan analisis data.

a. Study Pustaka,

Landasan teori dan pengetahuan lainnya yang menyangkut masalah analisis kebijakan publik yang akan dibahas didapat dari buku pegangan dan sumber-sumber lain seperti media cetak, laporan study dan lain-lain.

b. Pengumpulan data

- 1) Data Primer yang meliputi laporan bulanan, data manajemen, data organisasi dan data lainnya yang mendukung untuk analisis kebijaksanaan publik.

Data primer ini didapat melalui survey lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak lain.

2) Data sekunder di dapat dari buku-buku laporan tahunan.

c. Analisis data.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode SWOT dan AHP.